



ANALISIS PERUBAHAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR PROPINSI DI INDONESIA 2006-2011

Doni Mahardiki, Rokhedi Priyo Santoso✉

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>

Received : 2013; Accepted: 2013; Published: September 2013

Abstract

This study is to determine the level of income inequality in Indonesia period for 2006-2011 and to test whether the inequality increased significantly during that period. In addition, the purpose of this study was to map the pattern of regional classification based on economic growth. Technical analysis of inequality used is the Williamson Index and Theil Entropy Index. The Paired Sample T-Test is used to determine the significance of inequality growth from 2006 to 2011. Meanwhile the regional growth pattern was analyzed by Klassen typology. The research data includes the number of Indonesian population and Gross Domestic Product (GDP) per capita per province. According to the index calculation of Williamson, the level of income inequality in Indonesia tends to increase by 0.83 in 2011. Based on the Paired Sample T-Test it is found that the Williamson Index in 2011 increased significantly compared to that of in 2006. In contrast the Theil Index show the decreasing trend of income inequality eventhough there was slight increase at the end of period 2011. The results from the Klassen typology shows that most of region is classified as a higher growth but low income level of development.

Keywords: income inequality, Williamson Index, Theil Entropy Index, Klassen Typology

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia 2006-2011 dan melihat apakah selama periode tersebut terjadi peningkatan ketimpangan yang signifikan. Selain itu juga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola/klasifikasi daerah yang didasarkan pada pertumbuhan ekonominya. Metode perhitungan untuk analisis ketimpangan adalah Indeks ketimpangan Williamson dan Indeks ketimpangan Entropi Theil, sedangkan perkembangan distribusi pendapatan dengan Paired Sample T-Test. Analisis pola pertumbuhan menggunakan teknik Tipologi Klassen. Data penelitian meliputi jumlah penduduk Indonesia dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per provinsi. Menurut hasil perhitungan Indeks Williamson, selama periode penelitian tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan pergerakan yang meningkat dengan nilai pada tahun 2011 sebesar 0,83. Berdasarkan uji paired t-Test ditemukan hasil bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang signifikan pada 2011 dibandingkan dengan 2006. Sedangkan hasil dari Indeks Theil didapatkan tingkat ketimpangan di Indonesia selama periode penelitian cenderung menurun dengan nilai sebesar 0,34 pada tahun 2011 meskipun meningkat pada akhir periode. Hasil dari tipologi Klassen menunjukkan bahwa kecenderungan provinsi berada pada kategori daerah maju tapi tertekan.

Kata Kunci: ketimpangan pendapatan, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Tipologi Klassen

How to Cite: (2013). Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi Di Indonesia 2006-2011. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6 (2): 103-213 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596

© 2013 Semarang State University. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi pusat perhatian dalam masalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di suatu negara dan khususnya pada negara sedang berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang terus berupaya meningkatkan pertumbuhannya. Dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan daerah-daerah di Indonesia memiliki kandungan sumber daya alam yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, dengan status negara kepulauan menjadikan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan berbagai latar belakang etnik dan budaya yang berbeda-beda. Pada tahun 2000, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 206.264.595 jiwa yang tersebar di 33 provinsi. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang cepat melihat angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat.

Dimulai pada tahun 1954, sistem kelembagaan di Indonesia dijalankan dengan sistem negara kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu, menjadikan pemerintah pusat sebagai tingkat pertama, provinsi sebagai tingkat kedua dan kabupaten sebagai tingkat ketiga (Delis, dkk, 2008). Selain itu, pemilihan sebagian besar pejabat pada waktu itu dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga sistem pemerintahan masih bersifat terpusat. Sistem pemerintahan yang terpusat menjadikan segala kebijakan yang diambil bersumber dari pemerintah pusat. Tidak hanya sistem kelembagaannya saja yang terpusat akan tetapi pengelolaan pajak dan berbagai hasil kekayaan alam di Indonesia sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah hanya menerima sebagian dari yang sudah ditentukan oleh pusat. Daerah yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah tidak bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lantaran sumber fiskal daerah masih diatur oleh pemerintah pusat.

Hasil pajak dan pengelolaan kekayaan alam yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian didistribusikan ke seluruh daerah. Meskipun pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat sudah dibagi secara merata, akan tetapi masih saja terdapat daerah-daerah yang terbelakang baik dari segi ekonomi maupun pembangunannya. Masalah tersebut berpangkal pada pola pendistribusiannya yang mana pemerintah membagi rata pendapatan yang diterima kepada seluruh daerah tanpa melihat kondisi daerah tersebut apakah sudah maju atau belum. Hal ini menjadikan daerah yang sudah maju menjadi semakin maju dan yang belum maju menjadi semakin tertinggal pembangunannya.

Paradigma pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat mengharuskan adanya penyeragaman kebijakan di setiap daerah. Adanya penyeragaman tersebut menjadikan sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah tidak jauh berbeda. Tidak hanya dalam segi pemerintahan saja, akan tetapi eksekusi pelaksanaan proyek pembangunan juga harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah beralasan bahwa dengan adanya penyeragaman menjadikan hasil-hasil pembangunan menjadi lebih mudah diukur, dikendalikan, diawasi dan dievaluasi (Delis dkk, 2008).

Dampak negatif dari adanya sistem pemerintahan yang terpusat adalah semakin kuatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat baik dari segi keuangan maupun tatakelola pemerintahan daerah. Adapun akibat lain dari sistem ini yaitu perkembangan pembangunan yang hanya berkonsentrasi di pulau Jawa yang mana hal ini menjadikan pulau Jawa lebih maju dibandingkan pulau lainnya dan pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan struktur ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Mengingat luas wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadikan sistem sentralisasi tidak efektif diterapkan di Indonesia. Basri dan Munandar (2009:450) berpendapat

bahwa pada dasarnya sebuah sistem ekonomi tersentralisasi walaupun sukses diterapkan di Singapura, akan tetapi hal tersebut kurang cocok apabila diterapkan di Indonesia. Contohnya saja pada negara Meksiko yang lalai dalam membangun daerahnya sehingga pada akhirnya hanya akan menjadi beban finansial bagi pemerintah pusat. Distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata menjadi masalah penting yang perlu segera ditangani.

Otonomi daerah muncul sebagai solusi dalam menangani masalah-masalah yang muncul akibat dari adanya sentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Juri, 2012).

Pelaksanaan dari otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001 yang mana wewenang pengelolaan sistem pemerintahan yang bersangkutan langsung dengan masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Terdapat beberapa konsekuensi dari dijalankannya sistem otonomi daerah yaitu pemerintah daerah dituntut secara mandiri untuk mengelola keuangannya dengan berusaha menggali potensi fiskal yang dimiliki daerah tersebut dan bagaimana peran pemerintah

daerah dalam mengembangkan daerahnya serta kemampuan ekonominya.

Suatu daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan atau kapasitas fiskal daerah, seperti sumberdaya alam, potensi daerah, keadaan alam dan kemampuan sumberdaya manusia tiap-tiap daerah (Sultan dan Sodik, 2010). Hal itu menjadi sangat penting karena menentukan besarnya tingkat pendapatan suatu daerah. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah menjadikan tingkat pendapatan antar daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi fiskal yang dipunya. Adapun dampak lain dengan adanya otonomi daerah, terdapat kecenderungan masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam hal meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan.

Daerah-daerah yang relatif kaya mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berbeda dengan setelah adanya otonomi daerah, pada saat sistem pemerintahan Indonesia masih bersifat sentralisasi terdapat daerah-daerah di Pulau Jawa memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan industri yang masih terpusat di Pulau Jawa dan tidak hanya itu, faktor lokasi yang dekat dengan pusat pemerintahan juga mempunyai pengaruh terhadap tingginya suatu kegiatan ekonomi. Dengan adanya hal tersebut menjadikan

Tabel 1. Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Pulau Tahun 2006 Dan 2011

Pulau	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (persen)	
	2006	2011
Sumatra	4,7	4,84
Jawa	4,25	5,49
Bali dan Nusa Tenggara	2,73	1,69
Kalimantan	5,30	5,99
Sulawesi	5,28	7,05
Maluku dan Papua	-1,44	1,29

Sumber: BPS Indonesia, 2006 dan 2011 (diolah)

Pulau Jawa memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga dampak dari adanya kegiatan ekonomi yang terus berkembang, menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga tinggi. Seiring berjalannya sistem otonomi daerah menjadikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa saja, melainkan daerah-daerah di luar Pulau Jawa juga mengalami peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Suatu pertumbuhan ekonomi selain dapat dilihat dari jumlah output total yang tinggi juga dapat tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari masing-masing daerah.

Data diatas merupakan persentase dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita masing-masing provinsi di Indonesia. Dari tabel 1 dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun-tahun setelah diadakannya otonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi sudah mulai tersebar keberbagai daerah diluar Pulau Jawa yang tercermin dari persentase rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita. Pada tahun 2006, rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita dari masing-masing pulau sudah mulai naik dan hanya terdapat beberapa pulau yang rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapitanya masih rendah, yaitu Bali dan Nusa Tenggara dengan tingkat rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapitanya sebesar 2,73% serta Maluku dan Papua yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita hanya sebesar -1,44%. Pada tahun 2011, rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita masing-masing pulau menunjukkan kenaikan dan hanya terdapat penurunan sebesar 1,04% di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Data Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa kegiatan perekonomian sudah tidak lagi sepenuhnya berkonsentrasi di Pulau Jawa tetapi sudah mulai tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam Ilmu Ekonomi Regional terdapat suatu model yang menggambarkan hubungan ketidakseimbangan antara daerah yang dekat dengan pusat perkembangan dan daerah pinggiran. Daerah yang dekat dengan pusat perkembangan mempunyai

kesempatan untuk berkembang lebih besar jika dibandingkan dengan daerah yang berada di pinggiran. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan antar daerah.

Namun, kenyataan yang ada di negara berkembang adalah terdapatnya pembangunan yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pembangunan yang tidak merata juga mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata yang mana hal itu juga akan berdampak pada pertumbuhan PDRB per kapita. Menurut Sultan dan Sodik (2010) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata yaitu: konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang tidak merata, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi geografis antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pendapatan daerah yang selanjutnya akan berdampak pada proses pembangunan dan menyangkut kesejahteraan dari masyarakat. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh suatu daerah digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintah daerah tersebut termasuk juga dalam hal pembangunan. Akan tetapi, proses pembanguan tidak selalu berjalan sesuai rencana, terdapat beberapa daerah yang mengalami pembangunan secara cepat sementara daerah yang lainnya mempunyai laju pembangunan yang lambat.

Pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih adalah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Delis et all, n.d). Ketiga bidang tersebut merupakan fundamental dari pembangunan yang berhasil. Pada daerah yang sudah maju, pembangunan pada ketiga bidang tersebut sudah mengalami kemajuan yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah yang jauh dari pusat perkembangan. Hal tersebut terjadi karena tidak meratanya

fasilitas infrastruktur ekonomi serta bidang sosial yang menyebabkan adanya variasi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi semakin tinggi. Jika hal tersebut dibiarkan terus menerus, maka ketidakmerataan pembangunan antar wilayah akan semakin tinggi dan hal ini juga dapat memicu ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia.

Menurut Delis et al (n.d) yang meneliti ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1990-2008 mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakmerataan proses pembangunan antar daerah yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam aspek ekonomi. Hal tersebut terlihat dari semakin timpangnya distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat dan daerah. Selain dilihat dari tingkat pertumbuhannya, dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi juga bisa dilihat dari segi pendapatan perkapita penduduk antar wilayah di Indonesia.

Berdasarkan analisis Indeks Ketimpangan Williamson dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa ketimpangan pendapatan pada awal tahun 1990 adalah sebesar 0,491 dan tingkat ketimpangan tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin melebarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia hingga pada tahun 1997 tingkat ketimpangan berada di puncaknya yaitu sebesar 0,69. Peningkatan ketimpangan pada tahun tersebut terjadi lantaran pada waktu itu Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga berdampak pada penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang selanjutnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan penduduknya dan hal ini bisa dilihat dari besarnya pendapatan perkapita penduduk antar daerah.

Setelah melewati masa krisis ekonomi, tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin membaik yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya angka Indeks Williamson dan hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa secara agregat kondisi ekonomi Indonesia semakin

membaik. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya pengimplementasian otonomi daerah pada tahun 2000 dan semakin membaik setiap tahunnya hingga pada akhirnya pada tahun 2004 Indeks Ketimpangan Williamson menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan adalah sebesar 0,818 dan pada tahun 2008 adalah sebesar 0,815. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa selama periode penelitian yaitu tahun 1990-2008 terdapat ketimpangan yang semakin melebar di Indonesia.

Ketimpangan pada awalnya dapat disebabkan oleh adanya perbedaan suatu kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibatnya, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Di samping itu ketimpangan juga diperburuk oleh kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, terkonsentrasinya pada kegiatan ekonomi tertentu, dan ketidakmerataan alokasi dana antar wilayah. Terjadinya suatu ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya akan membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan (Syafriзал, 2012).

Kesenjangan ekonomi dapat diartikan sebagai perbedaan struktur ekonomi suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Menurut Kuncoro (2006) berpendapat bahwa kesenjangan ekonomi setidaknya dapat dilihat dari 3 dimensi yaitu: Pertama, berdasarkan tingkat kemodernan yaitu kesenjangan antara sektor modern dan sektor tradisional. Sektor modern pada umumnya berada di perkotaan sedang sektor tradisional umumnya berada di daerah pedesaan. Kedua, kesenjangan regional adalah suatu kesenjangan yang terjadi antara suatu daerah yang mempunyai potensi ekonomi tinggi dengan suatu daerah yang potensi ekonominya rendah. Ketiga, kesenjangan menurut etnis yaitu kesenjangan yang

timbul lantaran perbedaan etnis contohnya antar masyarakat pribumi dan non pribumi.

Apabila ketiga dimensi tersebut digabungkan maka akan diperoleh gambaran kesenjangan kemakmuran di Indonesia yaitu semakin ke kawasan barat Indonesia maka akan semakin banyak dijumpai sektor modern dan industri serta semakin banyak golongan non pribumi yang menguasai perekonomian. Sebaliknya, semakin ke kawasan Timur Indonesia maka akan semakin banyak dijumpai sektor pertanian dan tradisional serta semakin banyak pribumi yang mendominasi usaha bisnis.

Distribusi pendapatan dalam sebuah perekonomian merupakan hasil akhir dari kerja seluruh proses ekonomi, yang berarti bahwa teori distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua pengaruh (Gemmell, 1992: 205). Bank dunia memiliki kriteria yang mendasari dalam suatu penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah yang mana kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan menjadi tiga. Pertama, Tinggi, apabila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan. Kedua, Sedang, apabila 40% dari penduduk berpenghasilan rendah menerima 12-17% dari bagian pendapatan. Ketiga, Rendah, yaitu apabila 40% penduduk yang memiliki penghasilan rendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan utama untuk menganalisis seberapa besar dan perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia selama periode 2006-2011. Di samping itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan wilayah/provinsi di Indonesia berdasarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dikumpulkan oleh pihak kedua. Adapun sumber yang digunakan yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditunjang melalui studi kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data yang diambil merupakan data dari kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Adapun dalam pengolahan data, penulis menggunakan alat bantu software pengolah statistik SPSS dan Microsof Excel. Data-data yang digunakan adalah jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per propinsi di Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan adalah Indeks Williamson dan Indeks Theil. Sedangkan untuk menganalisis perkembangan dari awal periode penelitian sampai akhir periode penelitian digunakan Paired Sample Test yang sebelumnya diuji normalitas distribusi datanya dengan Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov. Sementara itu Tipologi Klassen digunakan untuk mapping pola dan struktur pertumbuhan ekonomi propinsi.

Indeks Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia digunakan perhitungan Indeks Williamson. Dalam perhitungannya, Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar. Adapun Indeks Williamson secara statistik dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 (\frac{F_i}{n})}{Y}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana V_w adalah nilai indeks ketimpangan Williamson, Y_i adalah PDRB per kapita masing-masing provinsi, Y adalah PDRB per kapita rata-rata seluruh provinsi, F_i adalah jumlah penduduk masing-masing provinsi, dan N adalah jumlah penduduk Indonesia

Nilai indek berada pada range

$0 < V_w < 10 < V_w < 1$. Jika $V_w V_w$ mendekati 1 maka ketimpangan semakin besar dan $V_w V_w$ mendekati omaka ketimpangan semakin kecil atau semakin merata.

Indeks Entropi Theil

Selain menggunakan Indeks Wiliamson, dalam mengukur suatu ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan Indeks Theil. Menurut Kuncoro (2001) konsep Entropi Theil dari suatu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Data yang diperlukan dalam analisis Indeks Theil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Secara matematis Indeks Theil dapat dituliskan sebagai berikut:

$$T_d = (Y_{ij}/Y) \log[(Y_{ij}/Y)/(n_{ij}/N)] \dots\dots(2)$$

Dimana $T_d T_d$ adalah Indeks Entropi Theil, $Y_{ij} Y_{ij}$ adalah PDRB per kapita provinsi j di Indonesia, YY adalah jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi., $n_{ij} n_{ij}$ adalah jumlah penduduk masing-masing provinsi di Indonesia, dan NN adalah jumlah penduduk seluruh provinsi. Apabila Indeks Theil mendekati 1 maka terjadi ketimpangan yang semakin besar dan apabila Indeks Theil mendekati 0 maka ketimpangan semakin mengecil atau semakin rata.

Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi dan pola dari masing-masing daerah berdasarkan tingkat

pendapatan dan tingkat pertumbuhan suatu daerah. Model Tipologi Klassen ini dikenalkan pertama kali oleh Leo Klassen. Menurut Arsyad (2010) mengatakan bahwa “Klassen menganggap daerah (regions) sebagai mikrokosmos yang diskrit (discrete microcosmos) yaitu daerah ekonomi yang dapat dipahami melalui studi tentang besaran ekonominya”. Pada dasarnya analisis tipologi daerah ini dalam membagi daerah mengacu pada dua indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Widodo (2006) mengatakan bahwa Tipologi Klassen ini dapat digunakan untuk mengetahui suatu gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Terdapat empat kriteria dalam analisis tipologi klasen yaitu: Pertama, daerah cepat maju dan tumbuh cepat (High income and high growth) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah. Kedua, daerah maju tapi tertekan (high income but low growth) adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata wilayah. Ketiga, daerah berkembang cepat (high growth but low income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan per kapitanya rendah dibanding dengan rata-rata wilayah. Keempat, daerah relatif tertinggal (low growth and low income) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dari rata-rata wilayah. Adapun Klasifikasi Wilayah menurut analisis Tipologi Klassen dapat digambarkan seperti dalam Nasution

Tabel 2. Klasifikasi Daerah/Wilayah menurut analisis Tipologi Klassen

	y	$y_i > y$	$y_i < y$
r			
$r_i > r$		Daerah maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
$r_i < r$		Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

(2011) pada Tabel 2.

Dimana r adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, y adalah rata-rata PDRB perkapita provinsi di Indonesia, r_i adalah pertumbuhan ekonomi suatu provinsi, dan y_i adalah PDRB perkapita suatu provinsi i

Analisis Tipologi Klassen dalam perhitungannya mendasarkan dalam pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah (Widodo, 2006).

Paired Sample T-Test

Besaran yang diperoleh dari perhitungan Indek Williamson dan Indek Theil setiap propinsi di Indonesia pada 2006 dan 2011 dibandingkan dengan teknik Paired Sample T-Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel dalam satu kasus data memiliki rata-rata yang sama. Uji Paired t-Test juga digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan mean (rata-rata) dalam dua variabel pada satu kasus data. Secara matematis rumus untuk mencari nilai t dari uji tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

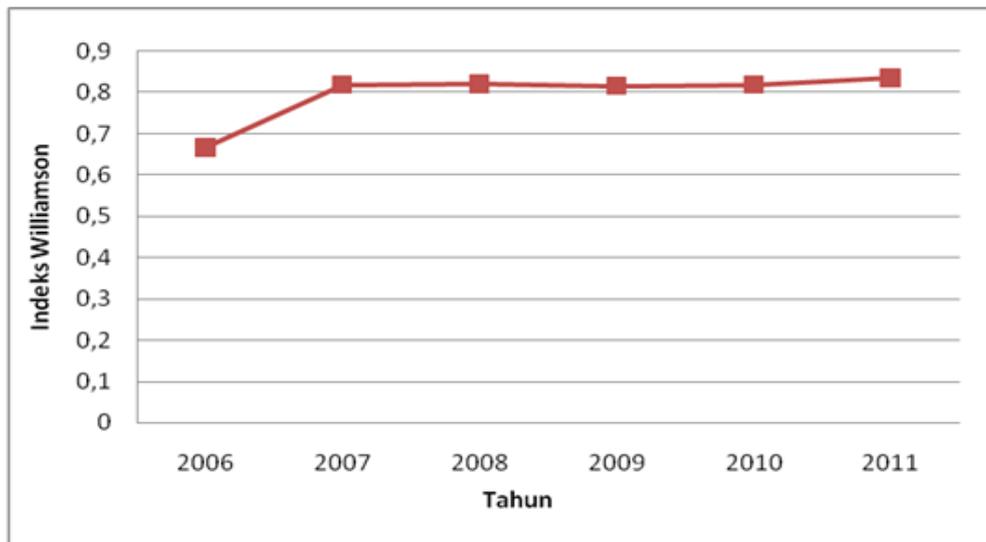
$$t = \frac{(x_1 - x_2)}{\sqrt{s^2p (\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana t adalah nilai distribusi t, x_1 adalah nilai rata-rata sample pertama, x_2 adalah nilai rata-rata sample kedua, s^2p adalah penduga varians gabungan populasi, n_1 adalah jumlah sampel populasi pertama, dan n_2 adalah jumlah sampel populasi kedua

Untuk mengetahui tingkat perbedaan yang ada sangat signifikan atau tidak, dapat dilihat melalui nilai probabilitasnya.

Dengan ketentuan jika nilai p value lebih besar daripada level of significant maka tidak terdapat perbedaan ketimpangan yang signifikan antara 2006 dan 2011 dan apabila p value lebih kecil daripada level of significant maka terdapat perbedaan ketimpangan yang signifikan.

Salah satu syarat Paired Sample T-Test adalah data berdistribusi normal. Sebelum data dari hasil Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil diuji dengan metode Paired Sample T-Test, data terlebih dahulu di uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji Kolmogrov-Smirnov adalah salah satu uji dalam analisis statistik yang bertujuan



Gambar 1. Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Di Indonesia 2006 – 2011
 Sumber: lampiran Indeks Entropi Theil, 2013.

untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara distribusi nilai pada sampel dengan distribusi teoritis tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub bab ini disajikan hasil dari perhitungan Indeks Kesenjangan Williamson, Indeks Entropi Theil, uji Normalitas dan Paired Sample T-Test, dan Tipologi Klasen. Hasil perhitungan dari Indeks Williamson selama periode penelitian 2006-2011 dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Indeks Ketimpangan Williamson Di Indonesia 2006-2011

Tahun	Indeks Williamsons
2006	0,667
2007	0,818
2008	0,820
2009	0,815
2010	0,818
2011	0,834
rata-rata	0,796

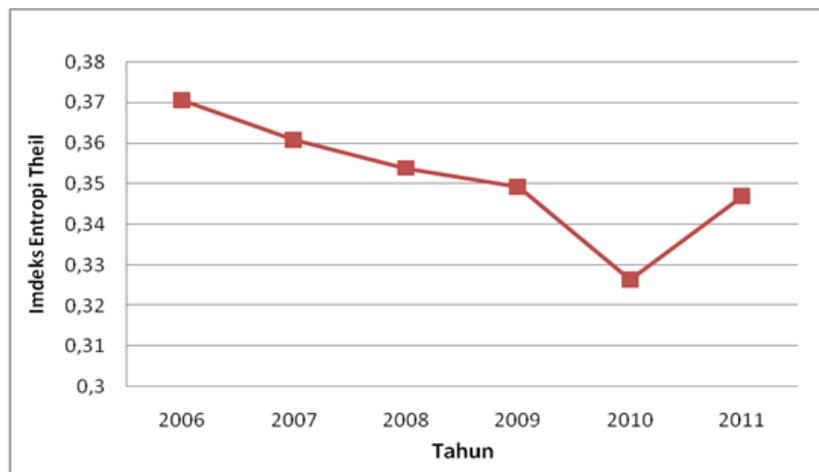
Sumber: Lampiran Indeks Wiliamson, 2013.

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar Provinsi di Indonesia selama periode 2006 – 2011 mencapai nilai 0,796. Ketimpangan antar Provinsi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2006 ke tahun 2011 cenderung meningkat. Pada tahun 2006 nilai Indeks Williamson sebesar 0,667 naik

menjadi 0,818 pada tahun 2007. Pada tahun 2008 naik lagi menjadi 0,820. Kenaikan angka Indeks Williamson pada tahun 2008 ini, dimungkinkan terkena imbas dari krisis global dan kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri. Angka Indeks Williamson kemudian turun menjadi 0,815 pada tahun 2009 sampai pada tahun 2010, dan 2011 meningkat lagi masing-masing sebesar 0,818 dan 0,834. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada bulan Maret 2011, mengatakan bahwa kenaikan harga komoditas global pada tahun 2011 memiliki kecenderungan yang sama dengan kenaikan harga komoditas yang terjadi pada tahun 2008. Meskipun naiknya harga dari komoditas tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara, akan tetapi hal tersebut perlu diwaspadai dampaknya terhadap masyarakat golongan menengah kebawah yang bisa menurunkan pendapatan riil masyarakat.

Secara umum nilai Indeks Williamson provinsi di Indonesia selama periode penelitian tahun 2006 – 2011 mengalami kecenderungan meningkat. Grafik kecenderungan peningkatan dan penurunan ketimpangan yang terjadi di provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.

Nilai Indeks Williamson di provinsi di Indonesia jika dilihat secara rata-rata tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar provinsi mengalami ketimpangan yang relatif tinggi. Hal ini



Gambar 2. Perkembangan Indeks Entropi Theil Provinsi di Indonesia 2006 – 2011

Sumber: lampiran Indeks Entropi Theil, 2013.

dapat dilihat dari nilai kesenjangan yang terjadi antar provinsi di Indonesia selama tahun 2006 – 2011 bersifat fluktuatif.

Selain menggunakan Indeks Williamson, dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia juga digunakan Indeks Entropi Theil. Dalam perhitungannya, Indeks Entropi Theil menggunakan variabel jumlah penduduk Indonesia dan PDRB per kapita masing-masing provinsi di Indonesia untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan yang ada. Adapun hasil perhitungan Indeks Entropi Theil yang diperoleh selama periode penelitian yaitu tahun 2006-2011 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Indeks Entropi Theil di Indonesia 2006-2011

Tahun	Indeks Entropi Theil
2006	0,3707
2007	0,3608
2008	0,3539
2009	0,3492
2010	0,3263
2011	0,3470
Rata-rata	0,3513

Sumber: lampiran Indeks Entropi Theil, 2013.

Pada tahun 2006, nilai Indeks Theil sebesar 0,3707 yang mana hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia pada tahun 2006 adalah relatif rendah. Nilai dari Indeks Theil pada tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,3608 dan 0,3539 serta pada tahun 2009 mengalami penurunan lagi yaitu menjadi sebesar 0,3492. Tahun 2010, nilai dari Indeks Theil menurun lagi menjadi 0,3263. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia pada tahun 2010 semakin rendah.

Penurunan tingkat ketimpangan pada tahun 2010 besar kemungkinan disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang semakin baik. Perkembangan yang semakin baik itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya Indonesia pada tahun 2010

sebesar 6.1%. Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut juga didukung oleh tingkat inflasi yang dijaga pergerakannya sehingga dalam tingkatan yang tetap sampai pada akhir tahun 2010 yaitu sebesar 6,33%. Penurunan angka ketimpangan pada Indeks Williamson 2010 menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tingkat ketimpangan di Indonesia sangat rendah atau relatif merata. Akan tetapi pada tahun 2011 nilai dari Indeks Theil sebesar 0,3470 yang berarti telah terjadi kenaikan sebesar 0,02 dari tahun sebelumnya 2010 yang mempunyai nilai Indeks Theil sebesar 0,3263. Untuk memudahkan melihat pergerakan nilai Indeks Theil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari Gambar 2.

Gambar 2 memperlihatkan pergerakan nilai Indeks Theil yang semakin menurun dari tahun ke tahun dan kembali naik pada tahun 2011. Adapun rata-rata dari nilai Indeks Theil adalah sebesar 0,3513. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ketimpangan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Theil, dapat diketahui bahwa pada akhir periode penelitian menunjukkan adanya kenaikan tingkat ketimpangan.

Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari masing-masing provinsi. Rata-rata PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia pada tahun 2006 – 2011 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Pada Tabel 5 Provinsi DKI Jakarta berada pada peringkat pertama rata-rata PDRB per kapita selama tahun 2006 – 2011 sebesar Rp. 38,416 ribu sedangkan untuk rata-rata PDRB per kapita paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 2,527 ribu. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah 14,83% dicapai oleh Papua Barat dan rata-rata pertumbuhan terendah adalah Nanggroe Aceh Darussalam sebesar -0,62%. Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Provinsi di Indonesia sebesar Rp. 8,889 ribu dan rata-rata pertumbuhannya adalah 6,050%. Klasifikasi pola dan struktur perekonomian provinsi di

Tabel 5. Rata-Rata PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Provinsi di Indonesia 2006-2011

Provinsi	Rata-Rata PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	8,102	-0,62
Sumatera Utara	8,227	6,25
Sumatera Barat	7,490	5,97
Riau	17,621	4,40
Jambi	5,401	7,03
Sumatera Selatan	8,193	5,39
Bengkulu	4,536	6,04
Lampung	4,681	5,63
Bangka Belitung	8,711	4,86
Kepulauan Riau	24,711	6,30
DKI Jakarta	38,416	6,14
Jawa Barat	7,034	5,93
Jawa Tengah	5,215	5,59
DI Yogyakarta	5,597	4,59
Jawa Timur	8,170	6,16
Banten	7,665	8,56
Bali	7,237	6,53
Nusa Tenggara Barat	4,024	4,39
Nusa Tenggara Timur	2,527	5,04
Kalimantan Barat	6,472	5,31
Kalimantan Tengah	8,082	6,14
Kalimantan Selatan	7,941	5,74
Kalimantan Timur	32,959	3,47
Sulawesi Utara	6,390	7,57
Sulawesi Tengah	6,107	8,57
Sulawesi Selatan	5,740	7,15
Sulawesi Tenggara	4,818	7,89
Gorontalo	2,575	7,57
Sulawesi Barat	3,775	9,12
Maluku	2,739	5,94
Maluku Utara	2,753	6,32
Papua Barat	10,007	14,83
Papua	9,419	-0,13
Rata-rata	8,889	6,050

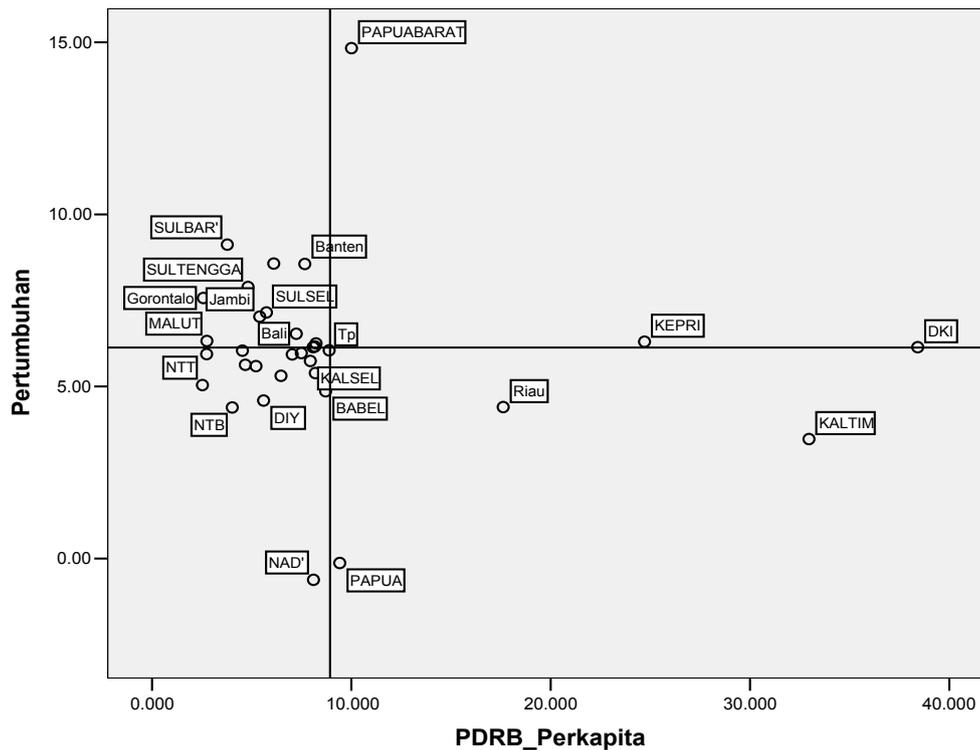
Sumber : BPS Indonesia, 2006 – 2011 (diolah)

Indonesia untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik pada Gambar 3 berikut:

Gambar 3 Pola dan Struktur Perekonomian Provinsi di Indonesia Menurut Tipologi Klassen 2006 –2011

Berdasarkan pengklasifikasian yang menggunakan Tipologi Klassen maka

dapat diketahui bahwa dari 33 Provinsi, 12 di antaranya termasuk dalam kategori daerah relatif tertinggal, karena rendahnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan PDRB perkapitanya yang berada di bawah rata-rata Indonesia. Pola dan struktur perekonomian provinsi di Indonesia 2006-2011 dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu: Pertama, Daerah cepat maju dan tumbuh cepat, Kuadran I (high growth



Sumber: Data sekunder BPS (diolah)

and high income). Propinsi ini meliputi Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papua Barat. Provinsi yang termasuk daerah cepat maju dan cepat tumbuh pada umumnya merupakan provinsi yang sudah maju dari segi pembangunan maupun pertumbuhan yang cepat. Di samping itu provinsi yang termasuk klasifikasi ini biasanya merupakan pusat perdagangan dan industri. Kedua, Daerah yang maju tetapi tertekan, Kuadran II (high income but low growth). Propinsi ini meliputi Provinsi Sulawesi Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Jambi, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah Banten, dan Sulawesi Selatan. Provinsi yang termasuk klasifikasi ini yang merupakan provinsi yang relatif maju, tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil.

Ketiga, Daerah yang berkembang cepat, Kuadran III (high growth but low income). Provinsi ini meliputi Provinsi

Papua, Riau, dan Kalimantan Timur. Provinsi yang termasuk klasifikasi ini merupakan provinsi yang mempunyai potensi besar, misalnya potensi minyak dan gasnya. Keempat, Daerah yang relatif tertinggal, Kuadran IV (low growth and low income). Provinsi ini meliputi 12 Provinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara Sulawesi Tengah, dan Maluku. Meskipun PDRB per kapitanya tinggi, namun pertumbuhan PDRB per kapita 12 Provinsi ini rendah. Provinsi yang termasuk klasifikasi ini merupakan provinsi yang dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya relatif lebih kecil dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Dua besaran indek ketimpangan Williamson dan Theil pada tahun 2006 dan 2011 di atas kemudian diuji apakah

terdistribusi normal atau tidak sebelum dilakukan Paired Sample T-Test. Adapun hasil uji normalitas pada data Indeks Williamson dan Indeks Theil dapat dilihat pada Tabel 6.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas dari Indeks Williamsons tahun 2006 dan 2011 adalah sebesar $0.000 < 0.05$ (α) yang artinya menolak H_0 atau data tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas pada Indeks Entropi Theil tahun 2006 dan 2011 mempunyai nilai probabilitas 0.006 dan $0.001 < 0.05$ yang artinya menolak H_0 atau data tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat ditarik kesimpulan bahwa data Indeks Williamson tahun 2006 dan 2011 serta Indeks Entropi Theil 2006 dan 2011 tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum data tersebut di uji dengan Paired Sample T-Test, maka data di transformasikan kedalam bentuk logaritma terlebih dahulu.

Uji Paired Sample T-Test dilakukan terhadap log Indeks Williamson dan Theil. Dengan menggunakan data yang sudah di log-kan terlebih dahulu maka didapatkan hasil pada Tabel 7.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa tingkat ketimpangan antara tahun 2006 dan tahun 2011 menunjukkan adanya perubahan ketimpangan yang signifikan. Sementara itu menurut perhitungan Indeks tidak terdapat perubahan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Lebih lanjut

dapat diartikan bahwa menurut perhitungan Indeks Williamsons, tingkat ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia selama periode penelitian tergolong tinggi atau relatif timpang. Berbeda dengan Indeks Williamsons, dalam perhitungan Indeks Entropi Theil menunjukkan hasil bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode penelitian relatif stabil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kesenjangan Williamson diketahui bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar provinsi di Indonesia selama periode 2006 - 2011 mencapai nilai 0,796. Secara umum nilai Indeks Kesenjangan Williamson Provinsi di Indonesia selama periode 2006 - 2011 mengalami kecenderungan meningkat. Kenaikan tingkat ketimpangan juga secara statistik signifikan. Sementara itu hasil perhitungan Indeks Kesenjangan Theil didapatkan rata-rata nilai Indeks Kesenjangan Theil pada tahun 2006 - 2011 sebesar 0,3513. Secara umum nilai Indeks Kesenjangan Theil dari provinsi di Indonesia selama periode 2006 - 2011 mengalami kecenderungan meningkat di akhir periode meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan Tipologi Klassen dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita dari

Tabel 6. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Pada Indeks Ketimpangan 2006 dan 2011

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Probabilitas	Keterangan
Indeks Williamson 2006	2.071	0.000	distribusi tidak normal
Indeks Williamson 2001	2.616	0.000	distribusi tidak normal
Indeks Theil 2006	1.707	0.006	distribusi tidak normal
Indeks Theil 2011	1.921	0.001	distribusi tidak normal

Sumber: Hasil uji Kolmogorov-Smirnov, 2013

Tabel 7. Hasil Paired Sample T-Test Indeks Ketimpangan 2006 dan 2011

Variabel	t-statistik	Probabilitas	Keterangan
Indeks Williamson	4.375	0.000	Ada Perbedaan
Indeks Theil	-0.396	0.696	Tidak Ada Perbedaan

Sumber: Hasil Olah Data Paired Sample t-Test, 2013.

masing-masing Provinsi di Indonesia dapat diketahui bahwa terdapat 3 provinsi yang masuk kedalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh cepat yaitu yaitu Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Papu Barat. Daerah yang masuk kedalam kategori daerah maju tapi tertekan sebanyak 15 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Jambi, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Bali, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah Banten, dan Sulawesi Selatan. Kategori selanjutnya adalah daerah yang berkembang dengan cepat dengan jumlah provinsi yang masuk kedalam kategori ini sebanyak 3 Provinsi yaitu Provinsi Papua, Riau, dan Kalimantan Timur. Jumlah Provinsi yang masuk kedalam kategori daerah yang relatif tertinggal adalah meliputi 12 Provinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Dalam mengatasi permasalahan lebarnya kesenjangan, paradigma kebijakan yang dibuat pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan antar daerah. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia adalah agar perencanaan pembangunan diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, lapangan usaha yang sedikit dan masih banyak lagi. Untuk meningkatkan kemampuan daerah yang kurang berkembang, pemerintah provinsi di Indonesia dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengelola potensi daerah yang ada. Dengan memberikan subsidi yang bersifat materi maupun non materi seperti mengirim tenaga ahli untuk memberikan penyuluhan, menjadikan masyarakat dapat berkreasi mengelola potensi wilayah tanpa harus menunggu petunjuk Gubernur dan Bupati, termasuk di dalamnya adalah membangun infrastruktur kabupaten dan kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS
- Basri, Faisal., dan Haris Munandar. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Blartman, Christopher., Jason Hwang., and Jeffrey Gale Williamson. (2007) *Winners and Losser in the Commodity Lottery the Impact of Trade Growth and Volatility in the Periphery 1870-1939*. *Journal of Development Economics* 82 (2007) 156- 179
- Chambers, Dustin. (2007). *Trading places: Does past growth impact inequality?.* *Journal of Development Economics*. 82 (2007) 257- 266
- Dellis, Arman., Roesmeli., dan Novita Sari. (n.d). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah di Indonesia Periode 1990-2008*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 4. website: <http://www.scribd.com/doc/8156319/Indonesia-Jurnal>.
- Gemmell, Norman. (1992). *Ilmu Ekonomi Pembangunan, Beberapa Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Gunther, Isabel .,and Michael Grimm. (2007). *Measuring pro-poor growth when relative prices shift*, *Journall of Development Economics* 82 (2007) 245- 256
- Juri, Mat. (2012). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda*. *Jurnal Eksis*, 8(1), 2020-2031.
- Kuncoro, Mudrajad. (2001). *Metode Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Edisi 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Edisi 4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, Mah. (2011). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/ Kota diProvinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2009 [Inequality of Local-Owned Revenue of Muncialities in North Sumatera]*. Unpublished Undergraduate Thesis. Undergraduate Program. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Pujiati, Amin. (2009). *Analisis Kawasan Andalan di Jawa Tengah*. *Jurnal Aset*, Vol. 11 No. 2, halaman 117-128
- Sjafrizal, Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sultan, Sultan., dan Jamzani Sodik. (2010). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Periode (2000-2004)*. *Buletin Ekonomi*, 8(1), 33-44
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah*

- Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Widiyati, Sri. (2011). Pengembangan Ekonomi Kabupaten Semarang Melalui Wilayah Andalan. *Jurnal Orbith* Vol. 7 No. 1, halaman 1-5
- Widodo, Tri. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.